

SUMBANGSIH TEOLOGI ABRAHAM KUYPER BAGI KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA: Sebuah Refleksi Iman Kristen

Chandra Wahyuni Irawati

Sekolah Tinggi Teologi Moriah, Tangerang, Indonesia

Email: chandrawahyuni@gmail.com

Submitted: 2 November 2023 Revision: 5 Mei 2024 Accepted: 31 Mei 2024

Abstract

The idea of Indonesian democracy is to fight for social justice for all Indonesians. Although the vision of social justice has long been echoed and fought for by the Indonesian people and has even been contained in detail in the state constitution, it has not yet been properly realized. The reality of social justice and welfare has not been realized for all, and economic disparity still exists in Indonesian society. One of the Christian theologians who focused on the framework for social and political reform is Abraham Kuyper. Using the literature research method, this paper investigates Kuyper's ideas and examines his contributions to social reform in the pursuit of social justice in Indonesia. Kuyper's vision is based on God's sovereignty over all aspects of life, which He has also delegated to humans, at least through the state, society, and the church.

Keywords: Social justice; Pancasila; Social transformation; Abraham Kuyper

Abstrak

Cita-cita demokrasi Indonesia adalah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Meskipun visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia bahkan telah termuat secara rinci dalam konstitusi negara namun belum terwujud dengan baik. Realita keadilan dan kesejahteraan sosial belum terwujud bagi semua, dan kesenjangan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat Indonesia. Salah satu teolog Kristen yang berfokus pada kerangka berpikir bagi pembaruan di bidang sosial dan politik adalah Abraham Kuyper. Dengan menggunakan metode riset literatur, tulisan ini mengkaji pemikiran Kuyper dan melihat sumbangsinya bagi pembaharuan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Visi Kuyper berpusat pada kedaulatan Allah atas semua aspek kehidupan yang juga mendelegasikan otoritas-Nya kepada manusia, setidaknya melalui negara, masyarakat, dan gereja.

Kata Kunci: Keadilan sosial; Pancasila; Transformasi sosial; Abraham Kuyper



PENDAHULUAN

Salah satu masalah krusial dan memprihatinkan yang cenderung terjadi di dalam masyarakat adalah ketidakadilan sosial. Melebarnya jurang kaya dan miskin, bertambahnya jumlah pengangguran, rendahnya upah buruh, perkosaan hak-hak kaum miskin oleh sementara pihak yang memegang kekuasaan entah ekonomi entah politis, pemutlakan hak pribadi yang telah membiarkan segelintir orang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa yang menguasai hidup banyak orang adalah beberapa wajah dari ketidakadilan sosial.¹ Masalah ketidakadilan sosial bukan hanya terjadi pada negara-negara terbelakang atau miskin, tetapi juga negara-negara yang tampak sudah menunjukkan struktur perekonomian, sosial dan budaya yang maju. Dan salah satu negara yang turut memperjuangkan perwujudan keadilan sosial tersebut adalah Indonesia.²

Bagi Negara Indonesia, sila “keadilan sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat.³ Namun sebagai negara yang majemuk, baik dalam keagamaan, suku, bahasa, budaya, dan aneka ragam adat istiadat, berbagai pengaruh kemajemukan dalam realitas hidup bersama terkadang tidak terhindarkan. Di tengah kemajemukan, nilai-nilai individualitas yang menciptakan heterogenitas cenderung mendapat tempat dalam masyarakat.⁴ Terciptanya kemungkinan akan berbagai konflik, kesenjangan sosial, deskriminasi, maupun realita ketidakadilan sosial yang dibiarkan dapat memberi peluang bagi disintegrasi bangsa. Karena itu, pemerintah dan masyarakat terus

¹ Di dalam tulisan H. Nurjaeni, menyitir dari hasil penelitian Sam Mountford Direktur Riset Globescan, 17 Januari 2010, menempatkan kemiskinan sebagai masalah paling serius yang dihadapi masyarakat dunia dibanding masalah perubahan iklim, terorisme, dan perang. Hasil survei mengemukakan bahwa angka kemiskinan ekstrem mencapai 71%. Kemiskinan merupakan problem sosial yang akan berdampak sistemik dan yang akan menurunkan pada problem-problem kompleks menyangkut politik, keamanan, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan. Warsito Utomo, *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional* (Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014), 23-24.

² Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 494-495.

³ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 606.

⁴ Kesadaran akan realitas keberagaman ini juga disebabkan oleh semakin majunya alat-alat komunikasi sehingga manusia semakin mudah mengenal berbagai hal, bukan hanya yang ada di sekitarnya, tetapi pada bagian bumi yang begitu jauh dari dirinya. Pluralitas juga dipercepat dengan kemajuan alat-alat transportasi sehingga manusia mudah bergerak dari daerah satu ke daerah yang lain. Kontak antar manusia yang berbeda latar belakang ini semakin membuka pemahaman akan keberagaman. Y. Hariprawo, “Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya,” *Orientasi Baru* 18, no. 1 (2009): 33.

didorong dalam upaya mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tercantum dalam sila ke lima Pancasila.⁵

Masyarakat adil dan makmur adalah tujuan akhir dari revolusi Indonesia. Meski visi tentang keadilan sosial telah lama bergelora dan diperjuangkan oleh bangsa Indonesia bahkan telah termuat dengan rinci dalam konstitusi negara namun belum terwujud dengan baik.⁶ Salah satu wujud keadilan sosial dalam arti luas dapat dilihat dari pemerataan ekonomi. Badan Pusat Statistika menunjukkan bahwa pemerataan ekonomi di Indonesia belum optimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia pada Maret 2022, menunjukkan persentase penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 9,54 persen atau 26,16 juta orang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa realita keadilan dan kesejahteraan sosial belum terwujud untuk semua, dan kesenjangan ekonomi masih terjadi dalam masyarakat Indonesia.⁸ Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD⁹ juga mengakui kondisi Indonesia saat ini belum masuk dalam tahap adil dan makmur. Oleh karena itu, sulit

⁵ Pada masa perjuangan kemerdekaan visi tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat diidealisasikan oleh para pejuang pergerakan dan mewarnai diskusi tentang dasar falsafah negara dalam persidangan BPUPKI. Klimaksnya ketika Soekarno mengungkapkannya dalam pidatonya pada 1 Juni 1945 yang kemudian dijadikan sebagai hari lahirnya Pancasila. Soekarno dalam pidatonya mengatakan, “Prinsip nomor empat sekarang saya usulkan... yaitu prinsip kesejahteraan; tidak ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka. Ide dan mimpi tentang kesejahteraan sosial ini kemudian dirumuskan sebagai salah satu unsur yang menyusun dasar falsafah Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila Sila Kelima yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” seterusnya mewarnai konstitusi Negara Indonesia. Piter Randan Bua, David Samiyono dan Tony Christian Tampake,” Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila,” *Kurios* 5, no. 2 (2019): 110; Latief, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 494.

⁶ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 493; Bua, “Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” 110.

⁷ Lihat Badan Pusat Statistik, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> (diakses 08 Desember 2022). Sebelumnya, jumlah penduduk miskin pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, meningkat 1,13 juta orang terhadap Maret 2020 dan meningkat 2,76 juta orang terhadap September 2019. <https://bisnisnews.id/detail/berita/dihantam-pandemi-angka-kemiskinan-dan-kesenjangan-sosial-di-indonesia-kian-lebar-> (diakses 08 Desember 2022).

⁸ Selain dalam bidang ekonomi, ketidakadilan sosial juga dapat dilihat dalam bidang lainnya, seperti bidang hukum dan kesehatan. Contoh yang menggambarkan ketidakadilan hukum di Indonesia ini adalah banyaknya kasus korupsi yang dilakukan para pejabat publik seperti kepala daerah, anggota legislatif, para kabinet, dan para politisi partai politik yang merugikan negara hingga milyaran rupiah, tetapi hukumannya tidak sebanding dengan apa yang telah diperbuat, bahkan walaupun di dalam tahanan masih mendapatkan fasilitas terbaik seperti hotel berbintang. Sedangkan jika kasusnya menimpa rakyat miskin seperti kasus yang pernah menimpa nenek yang mengambil kayu di kebun tetangganya, justru hukumannya tidak sebanding dengan apa yang diperbuat. Salsa Bela Kusna, “Kesenjangan Keadilan Sosial di Indonesia,” *Kompasiana*, 18 Juni 2021. <https://www.kompasiana.com/salsabelakhusna/5dff25a1097f363a3a106892/kesenjangan-keadilan-sosial-di-indonesia> (diakses 05 Desember 2022).

⁹ Mahfud menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dari 23 Oktober 2019 hingga 1 Februari 2024.

bagi Indonesia masuk dalam kategori maju atau masuk dalam masa Indonesia Emas yang selalu dicanangkan akan dicapai pada 2045.¹⁰

Selain pemerintah, tanggung jawab dalam mengupayakan keadilan sosial ini tentu saja melibatkan seluruh lapisan masyarakat, baik umat Kristen maupun non-Kristen.¹¹ Sebagai bagian dari masyarakat, gereja dan para imani Kristen juga memiliki peran menjalankan fungsinya sebagai alat anugerah Allah di tengah masyarakat. Gereja hadir sebagai saksi Kristus dan terlibat dalam berbagai masalah sosial guna membawa perbaikan.¹²

Salah satu teolog Kristen yang berfokus pada kerangka berpikir bagi pembaruan di bidang sosial dan politik adalah Abraham Kuyper.¹³ Pandangan Kuyper yang luas menyentuh aspek agama dalam kaitannya dengan kompleksitas tatanan sosial di dunia modern, termasuk aspek krisis sosial yang terjadi di masyarakat. Pemikirannya yang terus dikuasai oleh usaha pembaruan dalam bidang sosial dan politik tersebut dilaksanakan bukan semata-mata sebagai tugas, melainkan panggilanannya sebagai seorang Kristen.¹⁴ Karena itu James Bratt berpendapat bahwa mungkin warisan terbesar yang diberikan Kuyper pada zaman kita adalah “caranya mendorong orang-orang beriman untuk membawa keyakinan mereka ke ranah publik.”¹⁵

Di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, masalah-masalah sosial yang terjadi merupakan tanda-tanda krisis dalam masyarakat yang tidak dapat disangkal. Indonesia masih menghadapi problema kemiskinan, pengangguran, isolasi sosial, adanya para pelaku politik dan ekonomi yang dinilai telah memonopoli berbagai keuntungan dari “kemajuan” yang telah diraih hanya untuk kepentingan kelompok mereka sendiri, dan berbagai masalah ketidakadilan sosial lainnya. Menghadapi berbagai realitas krisis keadilan sosial dalam kemajemukan memerlukan pemikiran yang baru. Tulisan ini akan mengkaji teologi Abraham Kuyper dan melihat sumbangsih pemikiran tersebut bagi keadilan sosial di Indonesia.

¹⁰ Lihat CNN Indonesia. “Mahfud MD Akui Indonesia Belum Adil dan Makmur.” 17 Februari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217115736-20-475293/mahfud-md-akui-indonesia-belum-adil-dan-makmur> (diakses 22 Desember 2022).

¹¹ Abraham Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, terj. Calvin Budiman (Surabaya: Momentum, 2004), 15.

¹² Hariprabowo, “Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya,” 33-41.

¹³ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 14; Clinton Stockwell, “Abraham Kuyper and Welfare Reform: A Reformed Political Perspective,” *Pro Rege* 27, no. 1 (1998): 1-15.

¹⁴ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 10.

¹⁵ James D. Bratt, *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat* (Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2013), xiii. Sebagai tambahan, Soekarno sendiri diketahui memiliki penghargaan terhadap Kuyper. Dalam pidato pembelaannya pada tahun 1930 di Landraad Bandung yang dikenal dengan judul “Indonesia menggugat” Soekarno mengutip Kuyper dari buku *Antirevolutionaire Staatskunde* yang memaparkan secara objektif mengenai keuntungan dan kerugian yang bisa diakibatkan oleh penjajahan, dan menyebut Kuyper sebagai “pemimpin besar.” Lihat Soekarno, “Indonesia Menggugat” (Pidato Pembelaan di Landraad, Bandung, 1930; Wuysang, “Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila,” 200.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode riset literatur. Penulis akan berinteraksi dengan sumber-sumber primer maupun sekunder yang membahas mengenai Kuyper dan konsep-konsep pemikirannya. Melalui sumber-sumber tersebut, penulis kemudian mengumpulkan berbagai macam informasi dan data-data yang dibutuhkan.¹⁶ Adapun dasar pemikiran yang dipakai sebagai acuan adalah teologi Abraham Kuyper. Melalui kajian yang dilakukan dan dipaparkan, keunikan pemikiran Abraham Kuyper yang sangat akrab dengan reformasi sosial diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pembaharuan sosial dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia.

PEMBAHASAN

Teologi Abraham Kuyper dan Keadilan Sosial

Kuyper dilahirkan pada 1837 di sebuah kota kecil bernama Maassluis, di negeri Belanda, dan dibesarkan dalam sebuah keluarga Kristen Reformed (Calvinis), di mana ayahnya adalah seorang pendeta.¹⁷ Pada 1872, Kuyper menjadi seorang editor dari sebuah harian surat kabar yang bernama *De Standaard*.¹⁸ Selain itu, ia juga menjadi editor sebuah koran mingguan gereja, *De Heraut*. Melalui dua harian tersebut, Kuyper berusaha mendidik, menyalurkan, inspirasi, dan memobilisasi umat Kristen untuk sungguh-sungguh melayani Tuhan sesuai talenta dalam berbagai aspek kehidupan. Selain kontribusinya terhadap persoalan-persoalan gereja dan teologi, Kuyper juga merupakan seorang reformator di arena politik dan merupakan seorang pemikir sosial sekaligus pendiri dari sistem politik modern yang ada di Belanda sampai sekarang. Tujuan utama Kuyper adalah pembaharuan baik di dalam gereja maupun masyarakat.¹⁹

Kuyper memiliki pandangan yang unik tentang agama dalam kaitannya dengan tatanan sosial di dunia modern. Walaupun Kuyper tidak berbicara secara panjang lebar tentang hakikat

¹⁶ M. Azkari Zakariah, Vivi Afriani, dan M. Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research and Development* (Kolaka: Yayasan Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020), 89.

¹⁷ Bratt, *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat*, 35.

¹⁸ Harian ini menjadi corong bagi gerakan politik Anti-revolusi yang didirikan oleh Groen, tetapi belum diorganisasi dengan baik. Menjelang tahun 1879, Kuyper telah menjadi pemimpin gerakan tersebut. Ia mengorganisasinya dengan baik serta menjadikannya sebagai partai demokratik yang pertama di Eropa. Partai ini merupakan cikal-bakal bagi partai-partai yang sekarang ini dikenal dengan sebutan "Demokrasi Kristen." Sepanjang sisa hidupnya Kuyper membuktikan dan menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Kristen seharusnya memimpin aktivitas sipil bagi tercapainya tujuan yang lebih daripada sekadar ketertiban dalam bidang politik. Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 7.

¹⁹ Kent A. Van Til, "Abraham Kuyper and Michael Walzer: The Justice of the Spheres," *Calvin Theological Journal* 40 (2005): 269. Dalam pemikiran dan praktik Kuyper, kita menemukan bahwa iman Kristen, bidang ekonomi, keluarga, gerejawi, kekuasaan, dan praktik politik secara sadar saling terkait di bawah lengkungan teologi Calvinis. Hak-hak politik, nilai-nilai keluarga dan ekonomi, dan kebenaran agama berkoordinasi dan melengkapi, bukannya saling bertentangan. Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 7-14.

agama, tetapi pemahaman ini menjadi kerangka dasar pemikiran Kuyper. Dalam mengaitkan agama dengan kemajemukan masyarakat, Kuyper tidak membicarakan agama sebagai sebuah tindakan reaksioner.²⁰ Agama bukanlah salah satu aspek dari sekian banyak pilihan aktivitas yang manusia bisa pilih dan lakukan. Memang aktivitas religius melibatkan ibadah, doa, dan pengakuan iman, tetapi tindakan-tindakan tersebut bukanlah hakikat agama itu sendiri. Pada hakikatnya, seluruh kehidupan manusia bersifat religius. Kuyper memanggil umat Kristen untuk menghadapi masalah sosial dengan berangkat dari pemahaman alkitabiah tentang Allah, ciptaan, dan khususnya hakikat manusia.²¹

Visi transformasi sosial yang dimiliki Kuyper sangat dipengaruhi oleh pandangannya tentang konsep kelahiran baru. Ia melihat bahwa konsep kelahiran baru tidak hanya terbatas kepada manusia secara individu, namun juga kepada seluruh alam semesta. Seluruh ciptaan pada akhirnya akan dilahirbarukan dalam pembaharuan karya Allah. Kuyper menggunakan istilah *palingenesis* untuk menjelaskan pemikiran tersebut.²²

Pandangan Kuyper yang luas atas kelahiran baru menjembatani antara penekanan terhadap implikasi privat dan implikasi publik dari iman Kristen di dalam pemikirannya. Pemahaman atas konsep *palingenesis* yang demikian memungkinkan seseorang untuk melihat bahwa Kristus yang melahirbarukan diri setiap orang percaya adalah Kristus yang akan melahirbarukan seluruh ciptaan menjadi langit dan bumi yang baru. Orang-orang yang telah dilahirbarukan tidak hanya dipanggil untuk menanti Kristus membaharui semesta, namun dipanggil untuk turut serta dalam karya pembaharuan tersebut dengan memperjuangkan transformasi masyarakat di tempat mereka berada kearah yang lebih baik.²³ Perspektif Kuyper telah memberikan pemahaman mengenai Kristus dan pembaharuan sosial. Solusi bagi problema sosial berada pada sesuatu yang mempengaruhi keseluruhan aspek hidup manusia.

Berangkat dari metafisika Allah, Kuyper melihat bahwa Calvinisme mengembangkan hubungan fundamental antara manusia dengan Allah, dengan sesama dan dengan dunia.²⁴ Titik berangkat Calvinisme adalah Allah sebagai Pencipta keteraturan. Allah yang berdaulat menjadikan suatu paket ciptaan yang menyeluruh dan teratur di bawah sejumlah hukum dan Allah-lah yang menopang ciptaan tersebut. Ajaran Alkitab mengenai konsep kedaulatan Allah

²⁰ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 15.

²¹ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 13-15.

²² Istilah tersebut berasal dari kata Yunani *palingenesis*, yang dapat ditemukan di dalam Titus 3:5 merujuk kepada kelahiran baru secara pribadi, dan juga dapat ditemukan di dalam Matius 19:28 merujuk kepada kelahiran baru atas seluruh ciptaan untuk menjadi langit dan bumi baru. David Kristanto dan Tony Salurante, "Iman Kristen dan Ranah Publik: Sketsa Pemikiran Abraham Kuyper," *Epigraphe* 5, no 1 (2021): 41.

²³ Kristanto, "Iman Kristen dan Ranah Publik," 41.

²⁴ Antonius Steven Un, "Calvinisme dan Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis Terhadap Pemikiran Abraham Kuyper dan Implikasinya Pada Etika Ilmu Pengetahuan," *Societas* 3, no 1 (April 2016): 39.

yang dipopulerkan oleh John Calvin tersebut kemudian diadopsi Kuyper dan menjadi fondasi teologis dalam membangun konsepnya yang lain.²⁵ Konsep kedaulatan Allah menjadi tulang punggung bagi pembahasan sosial Kuyper. Kuyper menawarkan konsep *sphere sovereignty* (ranah kedaulatan) di mana kekuasaan tidak berada secara mutlak pada individu.²⁶

Konsep *sphere sovereignty* pertama kali dipaparkan Kuyper di dalam orasi pendirian *Free University Amsterdam*. Di dalam orasi inilah, Kuyper menyampaikan: “Tidak ada satu inci pun di dalam seluruh ranah kehidupan manusia yang mana Kristus, Penguasa atas segala sesuatunya, tidak mengatakan: milik-Ku!” Konsep ini pada dasarnya berbicara mengenai suatu rancangan Allah yang pasti atas segala ranah kehidupan manusia. Di dalamnya, terdapat ranah personal, ranah alam, ranah keluarga, ranah ilmu pengetahuan, ranah sosial, ranah gereja, dan lainnya.²⁷

Bagi Kuyper, sistem kehidupan menekankan hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungannya dengan dunia ditentukan oleh pemahaman tentang Allah. Allah adalah pusat segala sesuatu, sehingga mengakui Allah berarti menghargai manusia sebagai gambaran Allah dan menghargai dunia sebagai ciptaan-Nya. Allah telah menyediakan anugerah khusus untuk mengerjakan keselamatan, dan anugerah umum untuk memelihara kehidupan dunia, di mana pada akhirnya semua bertujuan untuk memuliakan Tuhan sebagai Pencipta.²⁸ Dasar dari konsep anugerah umum tersebut adalah kepercayaan terhadap kedaulatan Allah atas segala sesuatu sehingga orang percaya diberi tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam ketaatan kepada Yesus Kristus di dalam segala aspek kehidupan.²⁹

Anugerah umum dalam perspektif *sphere sovereignty* telah menjadi faktor pendorong Kuyper melihat segala bidang kehidupan dipersembahkan untuk memuliakan Allah yang berdaulat.³⁰ Dalam anugerah umum ada kemungkinan bagi manusia berdosa yang meskipun belum ditebus oleh Yesus Kristus namun dapat melakukan kebaikan. Allah tidak pernah meninggalkan ciptaan-Nya untuk sepenuhnya digerogeti oleh dosa. Sekalipun ciptaan berdosa dan tidak sempurna, namun banyak kebaikan yang masih dapat ditemukan di dalam ciptaan,

²⁵ Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism: Six Lectures from the Stone Foundation Lectures Delivered at Princeton University* (USA: ReadaClassic, 2010), 114.

²⁶ David W. Hall, *Calvin di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, dan Kebebasan Sipil* (Surabaya: Momentum, 2009), 360.

²⁷ Kristanto, “Iman Kristen dan Ranah Publik,” 42.

²⁸ Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 7.

²⁹ Kristanto, “Iman Kristen dan Ranah Publik,” 45.

³⁰ Kasieli Zebua dan Melianus Hura, “Sebuah Refleksi Misi Berdasarkan Pemikiran Abraham Kuyper,” *Skenoo* 2, no. 1 (2022): 8.

termasuk manusia berdosa. Semua kebaikan tersebut berasal dari kedaulatan Allah yang memilih untuk memenuhi kehendak-Nya di dalam ciptaan.³¹

Kontradiktif dengan revolusi yang terjadi pada zamannya, Kuyper bersama dengan Groen Van Prinsterer mencemooh Revolusi Prancis sebagai “kuman dari suatu kerusakan yang sekarang lebih mematikan daripada kerusakan yang dilawan oleh orang Prancis pada tahun 1789,” dan menggantikan “kehendak pencipta bangsa-bangsa dengan kehendak individu”.³² Pada tahun 1898, Kuyper berkata, revolusi Perancis mengabaikan Allah. Revolusi ini menentang Allah.” Sebaliknya Kekristenan mengusahakan “penundukan segala sesuatu kepada Allah (yang) menciptakan ikatan yang menggabungkan otoritas dan kemerdekaan.” Revolusi Prancis menyangkal semua otoritas, menggantikan tatanan yang ada dengan kesombongan manusia, dan mencoba “mendirikan otoritas palsu yang didasarkan pada kehendak bebas individu, sama seperti kerangka yang dipaku dengan papan dan tiang yang rapuh dan kemudian jatuh pada badai yang pertama.”³³

Menurut Kuyper, Revolusi Prancis yang oleh kebanyakan orang diterima dengan baik, telah menghasilkan masalah yang sebenarnya lebih buruk. Bukan karena mereka telah menggulingkan Bourbons (kelompok pemimpin di Prancis pada masa tersebut) dari kekuasaannya, bukan pula karena gerakan ini telah mendorong terbentuknya masyarakat kelas menengah yang jauh lebih berkuasa daripada para bangsawan dan rohaniwan, melainkan karena revolusi ini telah sepenuhnya mengubah kesadaran dan cara pandang orang-orang tentang kehidupan. Revolusi Prancis telah membuang iman kepada Tuhan demi terbentuknya otoritas yang didasarkan pada kehendak bebas manusia.³⁴

Kuyper melihat dorongan revolusi Perancis sebagai penolakan terhadap otoritas Allah. *Pertama*, iman Kristen mengajarkan bahwa kehidupan di dalam dunia ini tidak lain adalah bagian dari kekekalan. Revolusi Prancis, sebaliknya, menyangkali dan menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan kekekalan. *Kedua*, Kekristenan berbicara tentang taman Eden yang telah hilang, atau kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga manusia harus merendahkan diri dan bertobat.³⁵ Revolusi Prancis justru sangat meninggikan manusia dan membebaskan

³¹ Kristanto, “Iman Kristen dan Ranah Publik,” 45.

³² Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 360.

³³ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 360.

³⁴ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 49.

³⁵ Masalah-masalah sosial pada umumnya, dan khususnya masalah ketidakadilan sosial kerap kali berasal dari kecenderungan manusia untuk mementingkan dirinya, atau dalam istilah teologis, bersumber dari kedosaan manusia. Ketidakadilan sosial sebagaimana terjadi dalam bentuk jurang kaya-miskin, penghisapan manusia atas manusia, pengangguran, pemiskinan, perkosaan hak-hak kaum miskin dan sebagainya merupakan ungkapan dari situasi-situasi keberdosaan manusia. Ricardo Antoncich, *Iman dan Keadilan: Ajaran Sosial Gereja dan Praksis Sosial Iman* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 18.

manusia dari kebutuhan akan adanya pertobatan. *Ketiga*, iman Kristen mewartakan kasih Allah kepada dunia yang sudah dicemari oleh dosa. Revolusi Prancis mengganti berita kasih itu dengan nafsu dan perjuangan untuk meraih materi dan kesuksesan.³⁶

Pada akhirnya, akar bagi masalah sosial yang ditimbulkan oleh Revolusi Prancis meniadakan ikatan-ikatan sosial yang sifatnya organik dan menggantinya dengan kebebasan individu untuk mencukupi dirinya sendiri. Realita tersebut menjerumuskan kehidupan sosial pada ragam ketidakadilan, bahkan cenderung menimbulkan keruntuhan struktur sosial yang menghasilkan kehidupan immoral dan kejahatan yang terus meningkat seiring meningkatnya kebutuhan sosial.³⁷ Otoritas yang berpusat pada manusia hanya akan merusak seluruh tatanan masyarakat.³⁸

Dalam iman Kristen, otoritas dan kebebasan adalah dua hal yang berjalan bersama-sama berdasarkan prinsip bahwa segala sesuatu di dalam ciptaan harus tunduk kepada Allah. Visi Kuyper berpusat pada kedaulatan Allah atas semua aspek realitas, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan, sehingga ketaatan dan ketidaktaatan kepada Allah berhubungan dengan pandangan dunia seseorang.³⁹ Penekanan bahwa Allah berdaulat mengatur alam semesta dan segala aspek kehidupan di dalamnya berdasarkan hukum dan firman-Nya, yang dengan cara-Nya memberi identitas khusus pada setiap hal, memelihara keberagaman ciptaan secara menakjubkan, dan mencegah perusakan atas keberadaan yang lain.⁴⁰

Kuyper mengakui bahwa hanya Allah yang memiliki kedaulatan atau sumber segala otoritas, namun Allah juga memberikan kedaulatan kepada manusia. Kedaulatan yang diberikan Allah kepada manusia tersebut tentu bukanlah kedaulatan secara ultimat tetapi hanya memiliki kedaulatan dalam tingkat tertentu saja di dalam wilayahnya sendiri. Kedaulatan yang dimiliki oleh setiap bidang, sifatnya adalah diberikan Allah, dependen, diturunkan, didelegasikan, dan terbatas. Allah mendelegasikan otoritasnya kepada manusia secara konkrit dalam berbagai bidang, misalnya otoritas orang tua di rumah, otoritas khotbah di gereja, otoritas guru di sekolah, otoritas pemerintah dalam administrasi negara demi keadilan publik.⁴¹ Setidaknya Allah mendelegasikan otoritasnya kepada negara, masyarakat, dan gereja.

³⁶ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 52-54.

³⁷ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 52-54.

³⁸ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 360.

³⁹ Desi Sianipar, "Pluralisme Agama Menurut Abraham Kuyper dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Pendidikan Agama Kristen," *Shanan* 3, no. 1 (2019): 97.

⁴⁰ Kuyper, *Lectures on Calvinism*, 41; Abraham Kuyper, *Lectures on Calvinism: Six Lectures Delivered at Princeton University Under Auspices of the L. P. Stone Foundation* (Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1999), 13-17.

⁴¹ Chias Yohanes Wuysang dan Benyamin Fleming Intan, "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila," *Verbum Christi* 5, no 2 (2018): 185-86.

Dalam sebuah negara, pemerintah eksis untuk menetapkan keadilan Allah di bumi, dan untuk menopang keadilan tersebut.⁴² Ungkap Kuyper:

*God created the powers, including the states and the magistrates, to do His will: they are servants and instruments of God's sovereign power. The magistrates are instruments of "common grace" to thwart all license and out-rage and to shield the good against the evil. All powers, whether in empires or republics, in cities or in states, rule by the grace of God.*⁴³

Peran semestinya dari pemerintah atau pejabat sipil adalah sebagai alat dari anugerah umum, untuk menghambat segala kebebasan liar dan tindak kekerasan, dan untuk melindungi yang baik terhadap yang jahat, untuk menegakkan keadilan. Dan di samping semuanya ini, penguasa diangkat oleh Allah sebagai hamba-Nya, supaya dapat memelihara pekerjaan Allah yang mulia dalam penciptaan manusia dari kehancuran total.⁴⁴

Kuyper melihat tugas utama dari pemerintah sebagai penyandang senjata. Metafora ini mencakup tiga tugas utama: "Pedang ini adalah pedang keadilan, menjatuhkan hukuman terhadap kriminal. Pedang ini adalah pedang peperangan untuk membela kehormatan dan hak serta kepentingan negara melawan musuh-musuhnya. Dan pedang ini adalah pedang ketertiban, untuk menghalau segala pemberontakan." Sebab itu kewajiban pemerintah yang tertinggi masih tetap tidak berubah, yaitu dalam hal keadilan, dan kemudian pemerintah harus memelihara rakyat sebagai satu kesatuan.⁴⁵

Di tengah pemikiran tentang keadilan sosial, Kuyper juga menyadari kemajemukan publik. Seluruh ciptaan Allah, termasuk di dalamnya kehidupan masyarakat, akan berkembang semakin lama semakin kompleks melalui perjalanan sejarah.⁴⁶ Wilayah dan tanggung jawab kehidupan manusia pun sangat luas. Umat Kristen juga tampil di tengah publik, hidup, dan berkontribusi melampaui berbagai kebudayaan, ekonomi, politik, pendidikan, pengetahuan, dan seni yang berbeda. Di negaranya sendiri, Kuyper menerima kemajemukan tatanan sosial dan berusaha secara konsisten mengadakan pembaharuan kristiani di semua aspek kehidupan masyarakat.⁴⁷

Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang majemuk. Namun tentu kemajemukan tersebut tidak boleh disangkal dan diabaikan begitu saja. Kemajemukan juga tidak dapat menjadi alasan ketidakadilan sosial. Misalnya, demi alasan perkembangan ekonomi dan politik, ada individu-individu tertentu yang tidak seharusnya mati kelaparan lantaran

⁴² Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 361.

⁴³ Stockwell, "Abraham Kuyper and Welfare Reform: A Reformed Political Perspective," 5.

⁴⁴ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 361-64.

⁴⁵ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 364.

⁴⁶ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 14.

⁴⁷ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 16.

mereka tidak diakui keberadaannya dalam masyarakat. Atau di sisi lain, ada orang yang tidak dapat meraih kesempatan hidup yang lebih baik oleh karena alasan warna kulit, agama, kelas sosial, atau pun jenis kelamin. Ketidakadilan semacam ini jelas bukan kemajemukan masyarakat yang dimaksudkan oleh Kuyper. Di lain pihak, seruan bagi adanya solidaritas sosial sering kali merupakan ekspresi pemberhalaan tujuan utopis yang muncul dari sentimen agama-agama anti-Kekristenan. Kuyper sendiri mendorong terciptanya solidaritas sosial (atau kehidupan sosial yang sifatnya organik) baik di negaranya sendiri maupun secara internasional, namun ia melakukan hal tersebut berdasarkan penerimaan secara murni terhadap kemajemukan lembaga, komunitas, dan relasi sosial yang ada dalam masyarakat.⁴⁸

Bagi Kuyper, iman Kristen merupakan suatu wawasan dunia (*worldview*). Kuyper melihat bahwa sulit dimengerti kalau Kekristenan tidak memiliki pengaruh pada negara.⁴⁹ Kekristenan harus diterapkan pada masalah-masalah sosial dan politik: “Pandangan tentang kehidupan manusia yang diberikan oleh agama Kristen mendirikan... suatu titik berangkat yang kokoh dari mana solusi dari setiap masalah harus diusahakan.”⁵⁰ Orang Kristen harus berusaha mengintegrasikan norma-norma skriptural dengan realitas-realitas kehidupan publik.⁵¹

Orang percaya memiliki mandat ilahi untuk menjadi hamba Kristus dalam setiap aspek kehidupan. Karena terlalu menekankan pada yang rohani atau yang batiniyah, orang-orang Kristen di zaman Kuyper seringkali mengabaikan orang miskin dengan menggunakan ayat Alkitab yang mengatakan, “orang miskin akan selalu ada padamu.” Bagi Kuyper, pandangan yang demikian adalah suatu pandangan yang salah atas kemiskinan. Untuk mengatasinya, Kuyper menyoroti berita para nabi di Alkitab yang memerangi ketidakadilan sosial yang berdampak kepada kemiskinan.⁵² Oleh karena itu orang Kristen harus memikirkan implikasi iman Kristen terhadap ranah publik, seperti apakah hubungan iman Kristen dengan politik, seni, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan lainnya.⁵³

⁴⁸ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 16.

⁴⁹ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 360.

⁵⁰ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 362.

⁵¹ Hall, *Calvin di Ranah Publik*, 361.

⁵² Wuyang, “Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila,” 185-86.

⁵³ Kristanto, “Iman Kristen dan Ranah Publik,” 38-48; Roedy Silitonga, “Wawasan Dunia Kristen dan Bahasa: Kepentingan dan Implikasinya dalam Pemberitaan Injil Melalui Media Sosial,” *Luxnos* 6, no. 2 (2020): 125; Sianipar, “Pluralisme Agama Menurut Abraham Kuyper dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Pendidikan Agama Kristen,” 97.

Pemikiran Kuyper dan Keadilan Sosial di Indonesia

Bagi Kuyper, Allah yang berdaulat adalah sumber otoritas manusia. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan yang ultimat. Namun kedaulatan Allah tersebut juga diturunkan secara langsung kepada negara, masyarakat, dan gereja.⁵⁴ Setiap bidang memiliki identitas, tugas, dan hak khusus masing-masing yang diberikan oleh Allah. Setiap bidang tersebut juga akan bertanggungjawab kepada Allah.⁵⁵ Jika ketiga entitas ini bergerak sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan, maka keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia.

Negara adalah suatu organisasi masyarakat yang bertujuan menyelenggarakan keadilan.⁵⁶ Pemerintah memiliki otoritas dalam administrasi negara demi keadilan publik. Negara bukan bidang buatan manusia untuk dimanfaatkan hanya demi kepentingan manusia yang individualis.⁵⁷ Negara wajib mempertahankan keseimbangan antara bidang-bidang yang beragam. Jika terjadi suatu konflik, suatu bidang melewati garis batasnya, negara akan turun mengatur. Negara juga akan turun tangan jika dalam suatu bidang tertentu terjadi pelanggaran penggunaan kekuasaan yang menindas orang lemah. Salah satu tugas pemerintah adalah menjamin keadilan. Keadilan disini bukan hanya mengenai menghukum para pelanggar hukum, tetapi mengenai perlakuan yang adil bagi institusi-institusi yang ada serta individu-individu tertentu yang terlibat di berbagai bidang tersebut. Misalnya negara harus turun tangan ketika terjadi deskriminasi dalam masyarakat.⁵⁸

Sejalan dengan konsep kedaulatan Allah yang disuarakan Kuyper, maka alasan utama bagi negara Indonesia menjamin dan mewujudkan keadilan dalam masyarakatnya adalah konsep ketundukan pada kedaulatan Allah yang telah mendelegasikan otoritas-Nya kepada manusia secara konkrit melalui negara. Alasan selanjutnya adalah visi keadilan sosial sebagaimana dimuat dalam Pancasila dan konstitusi negara Indonesia. Keadilan sosial tersebut bukan hanya sebagai subjek dasar negara yang bersifat final dan statis, tetapi merupakan sesuatu yang harus diwujudkan secara dinamis dalam suatu bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cita-cita demokrasi Indonesia adalah memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, baik di bidang agama, ekonomi, politik, dan bidang-bidang lainnya.⁵⁹ Dalam konstitusi kata 'keadilan' yang kemudian diikuti kata 'sosial' seperti termatub pada

⁵⁴ Wuysang, "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila," 185-86.

⁵⁵ Van Til, "Abraham Kuyper and Michael Walzer: The Justice of the Spheres," 267-89; Wuysang, "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila," 185.

⁵⁶ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 583.

⁵⁷ Wuysang, "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila," 185-87.

⁵⁸ Wuysang, "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila," 188.

⁵⁹ Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 491.

Alinea IV Pembukaan UUD NRI 1945, bukan sebuah kebetulan karena kelaziman, melainkan lebih sebagai aktualisasi norma yang mengatur hubungan sosial antar orang-orang dalam sebuah ruang sosial. Hal ini merupakan manifestasi prinsip kesederajatan dalam kehidupan bersama secara wajar, yang dalam kehidupan keseharian berwujud kesediaan untuk berguna bagi orang lain. Keadilan sebagai kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang, apa yang seharusnya diterima. Untuk itu semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat adalah adil.⁶⁰

Amanat Konstitusi menegaskan keadilan sosial selalu ditujukan untuk mewujudkan atau terciptanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terwujudnya keadilan sosial harus didasarkan atas keadilan, ketertiban dan keteraturan, dimana setiap orang mendapatkan kesempatan membangun kehidupan yang layak sehingga tercipta kesejahteraan umum. Perwujudan keadilan sosial menghendaki upaya pemerataan sumber daya agar kelompok masyarakat yang lemah dapat dientaskan dari kemiskinan dan agar kesenjangan sosial ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat dikurangi.⁶¹

Perwujudan keadilan sosial dalam sebuah negara sangat ditentukan bukan hanya oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara, tetapi juga disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga. Dalam visi negara yang hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berlaku prinsip “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”.⁶² Karena setiap warga negara seharusnya berpartisipasi aktif turut mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Dalam hal ini, pihak lainnya seperti gereja juga memiliki tanggung jawab sosial, sesuai dengan tugas dan hak yang telah diberikan Allah.

Refleksi Iman Kristen bagi Keadilan Sosial

Meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang beragama, tetapi kehidupan keagamaannya tidak dilakukan di ruang privat, termasuk Kekristenan. Seluruh kehidupan bersifat religius, tetapi tidak semuanya bersifat gerejawi.⁶³ Jikalau Revolusi Prancis meniadakan ikatan-ikatan sosial yang sifatnya organik dan menggantinya dengan kebebasan individu untuk mencukupi dirinya sendiri, maka Kekristenan sebaliknya berusaha untuk

⁶⁰ Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan,” *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017): 16-17.

⁶¹ Purwanto, “Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia,” 16-17.

⁶² Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, 607.

⁶³ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 15.

mengangkat harkat manusia dalam relasi sosial melalui terbentuknya masyarakat yang sifatnya integratif dan organik.⁶⁴

Kekristenan adalah suatu wawasan yang komprehensif mengenai segala sesuatu. Kekristenan melihat dunia, baik material maupun spiritual sebagai sebuah sistem yang tertata.⁶⁵ Perjuangan demi keadilan juga merupakan bagian integral misi Gereja.⁶⁶ Gereja sebagai komponen yang tidak terpisahkan dari negara harus menyadari bahwa kesejahteraan negara juga adalah kesejahteraan gereja. Seperti ungkapan Yeremia 29:7, “Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu”. Karena itu, gereja seharusnya peduli dan ikut berpartisipasi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seperti termaktub dalam Sila Kelima Pancasila dan UUD 1945.⁶⁷

Peran serta imani Kristen dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya partial, tetapi harus holistik. Tujuan pencapaian keadilan sosial adalah manusia seutuhnya. Manusia memiliki keselarasan relasi baik secara vertikal dan horizontal. Keselarasan antara manusia dengan Tuhan yang berdaulat, antara sesama manusia tanpa membedakan keragaman, serta manusia dengan lingkungannya.⁶⁸ Ketaatan umat Kristen yang berpusat pada kedaulatan Allah diwujudkan dengan kepedulian pada perwujudan keadilan sosial. Salah satu wujud kepedulian tersebut adalah dengan mengedepankan harkat dan martabat manusia. Kitab Suci menekankan manusia sebagai ciptaan yang serupa dan segambar dengan Allah (Kej. 1:27). Kekristenan secara fundamental memberi sorotan kepada martabat manusia. Mengakui Allah berarti menghargai manusia sebagai gambar Allah dan menghargai dunia sebagai ciptaan-Nya.

Umat Kristen adalah agen untuk mewujudkan keadilan sosial. Gereja dipanggil bukan untuk menjadi penonton saja, tetapi untuk turut serta dalam pelaksanaan kehendak Allah dalam mewujudkan keadilan sosial. Umat Kristen dapat mengaplikasikan iman ke ranah publik guna memberikan kontribusi bagi pembaharuan sosial. Umat Kristen mengaplikasikan nilai-nilai Kristiani yang berorientasi kepada ketulusan, tidak mengedepankan kekuasaan, peduli terhadap mereka yang tertindas, tersingkir, terabaikan, dan mereka yang lemah.

⁶⁴ Kuyper, *Iman Kristen dan Problema Sosial*, 61.

⁶⁵ Silitonga, “Wawasan Dunia Kristen dan Bahasa,” 126.

⁶⁶ Hariprabowo, “Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya,” 33-41.

⁶⁷ Hariprabowo, “Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya,” 33-41.

⁶⁸ Jammes Juneidy Takaliuang, “Peran Orang Percaya dalam Mewujudkan Keadilan Sosial,” *Missio Ecclesiae* 4, no 2 (2015): 155-163.

KESIMPULAN

Berangkat dari konsep *sphere sovereignty*, visi Kuyper berpusat pada kedaulatan Allah atas semua aspek realitas, kehidupan, pemikiran dan kebudayaan. Hanya Allah yang memiliki kedaulatan atau sumber segala otoritas yang ultimat, namun Allah juga mendelegasikan otoritasnya kepada manusia, setidaknya melalui negara, masyarakat, dan gereja. Jika ketiga entitas ini bergerak sesuai dengan tujuan yang Allah tetapkan, maka keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan manusia. Setiap bidang memiliki identitas, tugas, dan hak khusus masing-masing yang diberikan oleh Allah dan juga akan bertanggungjawab kepada Allah.

Alasan utama bagi negara Indonesia dalam menjamin dan mewujudkan keadilan dalam masyarakat adalah konsep ketundukan pada kedaulatan Allah yang telah mendelegasikan otoritas-Nya kepada manusia secara konkrit melalui negara. Alasan selanjutnya adalah visi keadilan sosial sebagaimana dimuat dalam Pancasila dan konstitusi negara Indonesia. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, orang Kristen juga dipanggil untuk turut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan sosial. Orang Kristen memiliki mandat ilahi untuk menjadi hamba Kristus dalam setiap aspek kehidupan, termasuk sebagai agen keadilan sosial.

REFERENSI

- Antoncich, Ricardo. *Iman dan Keadilan: Ajaran Sosial Gereja dan Praksis Sosial Iman*. Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/07/15/1930/persentase-penduduk-miskin-maret-2022-turun-menjadi-9-54-persen.html> (diakses 08 Desember 2022).
- Beckford, James. *Social Theory and Religion*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Bratt, James D. *Abraham Kuyper: Modern Calvinist, Christian Democrat*. Michigan: Wm. B. Eerdmans, 2013.
- Bua, Piter Randan David Samiyono dan Tony Christian Tampake. "Misi Gereja dalam Mewujudkan Keadilan Sosial: Sebuah Perspektif dari Sila Kelima Pancasila." *Kurios* 5, no. 2 (2019): 109-124. <https://doi.org/10.30995/kur.v5i2.97>.
- CNN Indonesia. "Mahfud MD Akui Indonesia Belum Adil dan Makmur." 17 Februari 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200217115736-20-475293/mahfud-md-akui-indonesia-belum-adil-dan-makmur> (diakses 22 Desember 2022).
- Hadiwijono, Harun. *Iman Kristen*. Jakarta: Gunung Mulia, 2013.

- Hall, David W. *Calvin di Ranah Publik: Demokrasi Liberal, Hak Asasi, dan Kebebasan Sipil*. Surabaya: Momentum, 2009.
- Hariprabowo, Y. "Misi Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya." *Orientasi Baru* 18, No. 1 (2009): 33-49.
- Intan, Benyamin F. "Pancasila, Agama, dan Ranah Publik." *Reformed Center for Religion and Society*, 1 Juni 2011. <https://reformed-crs.org/pancasila-agama-dan-ranah-publik/> (diakses 20 Desember 2022).
- Keene, Timothy. "Kuyper and Dooyeweerd Sphere Sovereignty and Modal Aspects." *Transformation* 33 (2016): 65-79. <https://www.jstor.org/stable/90008856>.
- Kristanto, David dan Tony Salurante. "Iman Kristen dan Ranah Publik: Sketsa Pemikiran Abraham Kuyper." *Epigraphe* 5, no 1 (2021): 38-48. <http://dx.doi.org/10.33991/epigraphe.v5i1.246>.
- Kusna, Salsa Bela. "Kesenjangan Keadilan Sosial di Indonesia." *Kompasiana*, 18 Juni 2021. <https://www.kompasiana.com/salsabelakusna/5dff25a1097f363a3a106892/kesenjangan-keadilan-sosial-di-indonesia> (diakses 05 Desember 2022).
- Kuyper, Abraham. "Sphere Sovereignty" dalam Abraham Kuyper: *Centennial Reader*, ed. James Bratt. Michigan: Wm. B. Eerdmans, 1998.
- Kuyper, Abraham. *Ceramah-ceramah Mengenai Calvinisme*. Surabaya: Momentum, 2005.
- Kuyper, Abraham. *Iman Kristen dan Problema Sosial*, terj. Kalvin Budiman. Surabaya: Momentum, 2004.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism*. Grand Rapids: William B. Eerdmans, 1931.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism: Six Lectures Delivered at Princeton University Under Auspices of the L. P. Stone Foundation*. Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1999.
- Kuyper, Abraham. *Lectures on Calvinism: Six Lectures from the Stone Foundation Lectures Delivered at Princeton University*. USA: ReadaClassic, 2010.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Purwanto. "Perwujudan Keadilan dan Keadilan Sosial dalam Negara Hukum Indonesia: Perjuangan yang Tidak Mudah Dioperasionalkan." *Jurnal Hukum Media Bhakti* (2017): 1-19. <https://doi.org/10.32501/jhmb.v1i1.2>.
- Sianipar, Desi. "Pluralisme Agama Menurut Abraham Kuyper dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Pendidikan Agama Kristen." *Shanan* 3, no. 1 (2019): 97-108. <https://doi.org/10.33541/shanan.v3i1.1576>.

- Silitonga, Roedy. "Wawasan Dunia Kristen dan Bahasa: Kepentingan dan Implikasinya dalam Pemberitaan Injil Melalui Media Sosial." *Luxnos* 6, no. 2 (2020): 121-50. <https://doi.org/10.47304/jl.v6i2.46>.
- Skillen, James W. *Abraham Kuyper: The Problem of Poverty*. Grand Rapids: Baker, 1991.
- Steven Un, Antonius. "Calvinisme dan Ilmu Pengetahuan: Suatu Tinjauan Filosofis Terhadap Pemikiran Abraham Kuyper dan Implikasinya Pada Etika Ilmu Pengetahuan." *Societas* 3, no 1 (April 2016): 35-54. <https://doi.org/10.33550/sd.v3i1.29>.
- Stockwell, Clinton. "Abraham Kuyper and Welfare Reform: A Reformed Political Perspective." *Pro Rege* 27, no. 1 (1998): 1-15. https://digitalcollections.dordt.edu/pro_rege/vol27/iss1/1/
- Takaliuang, Jammes Juneidy. "Peran Orang Percaya dalam Mewujudkan Keadilan Sosial." *Missio Ecclesiae* 4, no 2 (2015): 155-163. <https://doi.org/10.52157/me.v4i2.54>.
- Utomo, Warsito. *Kristianitas dalam Kancah Perpolitikan Nasional*. Yogyakarta: Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia, 2014.
- Walzer, Michael. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. New York: Basic Books, 1983.
- Wuysang, Chias Yohanes dan Benyamin Fleming Intan. "Pluralisme Prinsipiel dan Refleksinya terhadap Pancasila." *Verbum Christi* 5, no 2 (2018): 183-204. <https://doi.org/10.51688/vc5.2.2018.art3>.
- Zebua, Kasieli dan Melianus Hura. "Sebuah Refleksi Misi Berdasarkan Pemikiran Abraham Kuyper." *Skenoo* 2, No. 1 (2022): 1-12. <https://doi.org/10.55649/skenoo.v2i1.20>.